

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang secara terus-menerus dan berkesinambungan selama ini, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil dan spiritual. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan untuk kepentingan pembangunan secara nasional, maka dibutuhkan sumber pembiayaan dan pajak merupakan sumber pembiayaan utama negara, salah satu sumber dana pemerintah adalah penerimaan dari sektor pajak.

Indonesia merupakan negara berkembang yang mengandalkan dua sumber utama, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Dengan mengoptimalkan sumber dana dalam negeri maka negara tidak akan bergantung lagi dengan dana yang bersumber dari luar negeri yang tidak pasti. Salah satu sumber penerimaan Negara terbesar adalah pajak, yang merupakan komponen utama dari penerimaan dana dalam negeri. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang semua totalnya dialokasikan dan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran dan pembangunan negara.

Setiap tahun pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak guna memenuhi pembiayaan atas pengeluaran Negara secara mandiri dan maksimal. Hal ini dilakukan antara lain dengan berbagai upaya sosialisasi dan peningkatan kualitas pelayanan pihak otoritas pajak. Seiring bertambahnya penduduk di negara ini, maka jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun juga semakin meningkat. Namun, ada fenomena yang muncul seiring bertambahnya wajib pajak tersebut dan juga tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Persepsi masyarakat yang menganggap bahwa pajak hanya sebagai pungutan wajib, tetapi bukan sebagai peran serta masyarakat dalam ikut serta memajukan negara bisa jadi salah satu penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak, karena mereka merasa belum melihat manfaat yang nyata bagi negara dan masyarakat. Padahal pemerintah sudah berupaya meningkatkan kualitas

pelayanan serta mengalokasikan hasil dari pajak yang diterima untuk kesejahteraan dari rakyat.

Peranan serta aparat perpajakan dalam melayani wajib pajak merupakan faktor penting dalam menyelesaikan masalah perpajakan. Masalah perpajakan adalah masalah antara pemerintah dengan rakyatnya sehingga masuk dalam kategori hukum perdata. Setiap penyimpangan atau pelanggaran terhadap pemenuhan perpajakan oleh wajib pajak akan dilihat sebagai masalah ketaatan terhadap Negara, bangsa dan negara. Oleh sebab itu masalah pajak harus diatur dengan sebaik-baiknya agar tidak mencederai hak dan kewajiban warga Negara atau untuk menjaga realisasi atau hubungan baik antara pemerintah dengan warga masyarakatnya.

Untuk menjalankan peraturan perpajakan perlu ada keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua pihak baik masyarakat kepada pemerintah dan sebaliknya pemerintah dengan masyarakat yang dilayaninya. Untuk itu perlu ada pembinaan dan pengawasan terhadap aparat pemerintah yang bertugas dalam menjalankan peraturan perpajakan. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, Kepolisian dan Pengadilan (Kehakiman dan Kejaksaan). Disamping itu juga peran DPR/D dalam membuat peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perpajakan.

Masalah pembinaan dan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masih menimbulkan berbagai permasalahan. Pola pelayanan dan pola hidup sebagian besar ASN masih menimbulkan kecemburuan dari kalangan menengah ke bawah terhadap pelayanan yang diberikan oleh ASN. Pelayanan yang baik tentu dihasilkan oleh pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku dan tindak tanduk ASN dalam menjalankan peraturan perpajakan.

Salah satu yang dapat dilakukan oleh aparat perpajakan dalam hal pengawasan dan pengendalian pajak (tax control), karena keberhasilan suatu lembaga dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sangatlah bergantung kepada orang-orang yang berada di lingkungan lembaga tersebut. Pengawasan adalah kemampuan administratif dalam rangka persiapan, pengaturan, dan 5 koordinasi. Pengawasan sebagai salah satu unsur pengurus

untuk melihat apakah tujuan yang ditetapkan oleh undang-undang atau oleh asosiasi yang sebenarnya tercapai atau tidak. Kontrol disini yang diharapkan dapat menjamin bahwa komitmen pembebanan telah dilakukan sesuai dengan yang telah diatur dan telah memenuhi persyaratan formal dan material. Dalam kontrol biaya, periksa angsuran biaya, termasuk memeriksa apakah organisasi telah membayar lebih banyak tugas daripada ukuran penilaian yang harus dibayar.

Kinerja kepatuhan wajib pajak (WP) masih belum sesuai ekspektasi. Data Ditjen Pajak Indonesia menunjukkan sampai semester 1/202 jumlah wajib pajak (WP) yang telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) hanya 11,46 juta atau 60,34 persen dari target sebanyak 19 juta WP yang lapor SPT. Dengan jumlah tersebut, artinya masih ada sebanyak 7,54 juta wajib pajak yang belum menyampaikan kewajiban tahunannya. Otoritas pajak, dalam bahan paparannya, berdalih bahwa persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi tidak mencapai target.

Berdasarkan latar belakang diatas masih banyak lagi perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Maka dari itu, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI EMPIRIS PADA KPP PRATAMA BEKASI)”**

1.2 Rumusan Permasalahan

Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang timbul sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menguji dan menganalisis sanksi pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk menguji dan menganalisis kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pembinaan dan pengawasan pemerintah pada kepatuhan wajib pajak, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Bagi Instansi

Penelitian ini di harapkan dapat memberi masukan kepada instansi yang terkait, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara maupun Ditjen Pajak dalam upaya menyadarkan masyarakat yang kurang patuh membayar pajak agar dapat memenuhi kewajiban wajib pajak serta memberikan saran atas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. Agar kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, peran pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.5 Batasan Masalah

Dengan cukup banyaknya permasalahan yang timbul mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi maka perlu diadakan adanya pembatasan masalah agar penelitian ini lebih spesifik, untuk itu penelitian ini dibatasi pada factor - faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi seperti Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka pembahasan mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Peran Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ini dibahas dalam 5 bab dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Mengenai uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Pembatasan Masalah, dan Sistematika Penelitian Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Literatur yang mendasari topik penelitian pada umumnya yang terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Mengenai uraian dari desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Mengenai gambaran secara umum, mengenai tempat penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan serta implikasi manajerial yang diperlukan dapat bagi pihak-pihak berkepentingan.